

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran

Masa pendudukan Jepang merupakan salah satu periode yang paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Meskipun Jepang menduduki Indonesia hanya selama 3,5 tahun, namun telah membawa perubahan yang besar, termasuk dengan membagi Indonesia menjadi tiga wilayah yaitu, Sumatera di bawah kepemimpinan Angkatan Darat (AD) ke-25, Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat ke-16, serta Kalimantan dan Indonesia bagian Timur yang berada di bawah kepemimpinan Angkatan Laut (AL). Memang sejak menjelang berakhirnya masa pemerintahan Kolonial Belanda di tahun 1940-an, Jepang tampil sebagai kekuatan baru di Asia, termasuk di Indonesia. Hingga ketika berakhirnya pemerintahan Kolonial Belanda, Jepang memasuki Indonesia dan menanamkan pengaruhnya dengan kuat.

Di awal masa pendudukan, Jepang mengubah sistem pemerintahan di Jawa dan Madura dengan membagi wilayah menjadi tujuh belas *shū* (karesidenan), salah satunya adalah Bogor *Shū* atau Karesidenan Bogor. Sebuah *shū* atau karesidenan dipimpin oleh *Shuuchoukan* atau *Shūchōkan* (gubernur), yang mana *Shūchōkan* pertama di Bogor adalah Kolonel Sonoyama yang dilantik pada September 1942. Bogor *Shū* terdiri dari *Ken* (kabupaten) dan wilayah *Shī* (kota). Untuk daerah *Ken*, terdiri dari Bogor *Ken*, Sukabumi *Ken*, dan Cianjur *Ken*, sedangkan daerah *Shī* terbagi menjadi Bogor *Shī* dan Sukabumi *Shī*.

Di bawah Ken, terdapat *gun* atau distrik. Bogor *Ken* terdiri dari beberapa *Gun*, yaitu Parungpanjang, Lemahabang, Cibarusa, Jonggol, Cileungsi, Cibinong, Depok, Cigombong, Kopo/Cisarua, Ciawi, Kedunghalang, Parung, Semplak, Ciomas, Dramaga, Ciampea, Leuwiliang, Cigudeg, Jasinga, dan Bogor. Sedangkan di Sukabumi *Ken*, juga terdapat beberapa *Gun*, yaitu Cicurug, Parungkuda, Klapanunggal, Cikidang, Cibadak, Cisaat, Ciemas, Jampang Kulon, Lengkong, Bojonglopan, Sagaranten, dan Miramontana (Zuhdi, 2017). Dengan terbentuknya pemerintahan baru, maka Jepang melaksanakan kebijakan-kebijakan, terutama untuk meningkatkan produksi pangan. Berbagai cara dilakukan oleh Jepang untuk mencapai tujuannya.

Berbagai kebijakan yang dijalankan oleh Jepang pada akhirnya mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di Bogor. Kondisi sosial sendiri dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang berkaitan dengan keadaan atau situasi dalam masyarakat tertentu yang berhubungan dengan keadaan sosial atau kehidupan sosial, dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur sosial dan kemasyarakatan yang meliputi budaya, agama, masyarakat, politik, adat istiadat, norma, dan ideologi. Sedangkan yang dimaksud dengan kondisi ekonomi adalah suatu kemampuan yang diukur dari keuangan, pendapatan, produksi dan konsumsi (termasuk transportasi dan tabungan) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

Bidang sosial dan ekonomi merupakan bidang kehidupan yang dapat dikatakan penting dan memiliki dampak besar bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Baik bidang sosial maupun ekonomi, keduanya beriringan dengan

kehidupan masyarakat. Bidang sosial dan ekonomi memiliki keterkaitan satu sama lain, yang dapat kita lihat dalam berbagai kegiatan ekonomi yang ternyata memberikan dampak bagi keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat. Ilmu sosial juga merupakan suatu bidang ilmu yang dapat berperan dalam menentukan kebijakan ekonomi. Jika melihat keadaan dan kondisi secara langsung pada masyarakat, kemiskinan merupakan topik permasalahan yang seringkali melibatkan ilmu sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, kemiskinan terjadi karena distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak merata yang mana menyebabkan kesenjangan pendapatan. Dengan melihat kondisi sosial tersebut, maka ilmu ekonomi akan merumuskan kebijakan yang tepat untuk menanggulangi masalah tersebut (Soelaeman, 2011).

Contoh lainnya adalah dalam penerapan pajak yang diterapkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pajak sendiri merupakan salah satu bagian dalam kegiatan atau cakupan ilmu ekonomi. Penerapan beban pajak telah menyebabkan terjadi kemiskinan karena tingginya beban pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan ekonomi cenderung bertentangan dengan kepentingan masyarakat kecil. Ekonomi juga dapat mempengaruhi laju atau perkembangan kehidupan sosial di masyarakat. Pengaruh ini dapat terlihat dari kondisi dan pertumbuhan ekonomi yang mana memberikan dampak bagi tingkat kesejahteraan dan kesenjangan dalam masyarakat. Jika kondisi perekonomian rendah dan program-program ekonomi kurang memperhatikan pembangunan sosial, maka

akan berdampak dengan banyaknya fenomena pengangguran, kemiskinan, konflik sosial, dan demoralisasi, begitupun sebaliknya.

Sosial dan ekonomi menjadi bidang kehidupan yang berdampak besar dan berpengaruh selama periode pendudukan Jepang di Indonesia. Beberapa contoh permasalahan sosial-ekonomi yang tampak pada masa pendudukan Jepang di Bogor adalah kemiskinan, pengerahan tenaga rakyat, juga peranan para tokoh Islam dan masyarakat dalam mendukung kebijakan ekonomi. Maka dari itu, peneliti berupaya menelaah mengenai kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di Bogor, dan bagaimana dampak dari pendudukan Jepang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat Bogor pada masa pendudukan Jepang, yang mana mengkaji mengenai perubahan yang terjadi.

Objek kajian dari penelitian ini menitikberatkan pada wilayah Bogor di masa pendudukan Jepang yaitu Bogor *Shū*, karena Bogor merupakan salah satu wilayah strategis dan relatif memiliki jarak yang cukup dekat dengan Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan Indonesia. Selain itu, Bogor juga menjadi wilayah dengan aktivitas ekonomi yang cukup berpengaruh. Di tahun 1940, Karesidenan Bogor memproduksi sebanyak 567.100 ton padi. Meskipun jumlah produksi tersebut tidak sebesar karesidenan lain di Jawa Barat, seperti Jakarta, Priangan, dan Cirebon. Selain itu, Bogor juga cukup berperan dalam kegiatan ekspor dan impor beras antar karesidenan pada masa pendudukan Jepang. Bogor juga memiliki jumlah penduduk yang cukup besar di Jawa Barat, setelah Jakarta dan Priangan, dengan jumlah populasi sekitar 2.202.120

penduduk terhitung pada tahun 1930 (Kurasawa, 2015). Namun, jumlah tersebut mungkin mengalami perubahan selama masa pendudukan Jepang. Dengan jumlah penduduk yang cukup padat dan peranan dalam kegiatan ekonomi, maka tidak heran jika Bogor menjadi salah satu wilayah yang cukup berpengaruh.

Topik ini penting dan layak untuk diteliti karena alasan-alasan tersebut, sehingga menjadi titik tolak peneliti untuk membahas kajian mengenai kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Bogor karena bidang sosial dan ekonomi merupakan bidang kehidupan yang dampaknya dirasakan secara langsung bagi masyarakat, khususnya di Bogor. Penelitian ini juga menarik untuk diteliti karena dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana kondisi yang terjadi dalam bidang sosial-ekonomi selama masa pendudukan Jepang di Bogor.

Terkait orisinalitas dari penelitian ini, berdasarkan pengamatan peneliti, masih belum banyak penelitian yang membahas mengenai topik ini. Meskipun sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang membahas mengenai kehidupan ekonomi di Bogor, seperti tulisan Saring, Januar Barkah, dan Huddy Husin yang berjudul “Diantara Bayang-Bayang Eksploitasi Perkebunan dan Involusi Pertanian : Kehidupan Petani di Bogor 1905-1960 an” (2017). Dalam artikel tersebut dibahas mengenai keadaan para petani di Bogor sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, masa pendudukan Jepang, masa awal kemerdekaan, hingga menjelang masa Orde Baru. Selain itu, ada skripsi yang ditulis oleh Najmah Fairus mengenai “Pengaruh Pendudukan

Jepang Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Karesidenan Malang Tahun 1942-1945” yang ditulis pada tahun 2011 di Universitas Jember. Dalam skripsi tersebut, dibahas mengenai bagaimana keadaan sosial-ekonomi masyarakat Malang pada masa pendudukan Jepang, mulai dari kebijakan ekonomi pertanian, peranan elit tradisional, pertanian dan perkebunan di Malang, serta dampak dari pendudukan Jepang bagi masyarakat Malang.

Perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti terletak pada fokus pembahasannya, di mana dalam hal ini, peneliti membahas mengenai keterkaitan antara aktivitas dan kebijakan ekonomi dengan kehidupan sosial masyarakat Bogor pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945 yang mana mengkaji mengenai pendudukan Jepang di Bogor, pertanian dan perkebunan, perdagangan, dan peranan koperasi (kumiai). Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran bagaimana kehidupan sosial masyarakat sebagai dampak kebijakan ekonomi seperti, kemiskinan, peranan para tokoh dan elite masyarakat, pendidikan, serta pengerahan tenaga rakyat.

1.2 Pembatasan dan Perumusan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibatasi secara spasial maupun temporal. Batasan spasial atau tempat dari penelitian ini adalah Bogor atau pada masa pendudukan Jepang disebut dengan Bogor *Shū*, yang terdiri dari wilayah Bogor, Sukabumi, dan Cianjur.

Untuk gambaran lebih jelas mengenai struktur pemerintahan dan wilayah dalam Bogor *Shū*, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Struktur Pemerintahan	Wilayah
<i>Shū</i> (Karesidenan)	Bogor <i>Shū</i>
<i>Ken</i> (Kabupaten)	Bogor <i>Ken</i> , Sukabumi <i>Ken</i> , Cianjur <i>Ken</i>
<i>Shī</i> (Kotapraja/setara dengan <i>Ken</i>)	Bogor <i>Shī</i> dan Sukabumi <i>Shī</i>
<i>Gun</i> (Distrik yang berada di bawah <i>Ken</i>)	<p><i>Gun</i> di Bogor <i>Ken</i>: Parungpanjang, Lemahabang, Cibarus, Jonggol, Cileungsi, Cibinong, Depok, Cigombong, Kopo atau Cisarua, Ciawi, Kedunghalang, Parung, Semplak, Ciomas, Dramaga, Ciampea, Leuwiliang, Cigudeg, Jasinga, dan Bogor.</p> <p><i>Gun</i> di Sukabumi <i>Ken</i>: Cicurug, Parungkuda, Klapanunggal, Cikidang, Cibadak, Cisaat, Ciemas, Jampang Kulon, Lengkong, Bojonglopang, Sagaranten, dan Miramontana</p>

Table 1. Wilayah Bogor Shuu

Masyarakat yang dikaji adalah adalah masyarakat kecil, seperti para pedagang, petani, pengrajin, buruh, dan masyarakat yang merasakan langsung dampak kebijakan yang diterapkan pada masa pendudukan Jepang. Sedangkan, batasan temporal atau waktu dari penelitian ini adalah kehidupan

masyarakat yang berlangsung selama periode pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 hingga 1945.

Rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana asal mula masuknya pendudukan Jepang dan kebijakannya dalam pemerintahan?
2. Bagaimana asal mula masuknya Jepang ke Bogor dan kebijakannya dalam pemerintahan di Bogor?
3. Bagaimana kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di Bogor pada masa pendudukan Jepang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan awal mula masuknya pendudukan Jepang dan kebijakannya dalam pemerintahan.
2. Mendeskripsikan awal mula masuknya Jepang ke Bogor dan kebijakannya dalam pemerintahan di Bogor.
3. Menggambarkan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di Bogor pada masa pendudukan Jepang.

Kegunaan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan mengenai kehidupan masyarakat di Bogor pada masa pendudukan Jepang.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai keadaan sosial-ekonomi di Bogor pada masa pendudukan Jepang.

3. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan atau sumber pembelajaran serta penelitian.
4. Memperkaya referensi materi pembelajaran Sejarah Indonesia Masa Pendudukan Jepang.
5. Meningkatkan kepekaan lingkungan sekitar terkait bidang sosial dan ekonomi di masyarakat.

1.4 Metode dan Bahan Sumber

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Dalam metode historis, terdapat beberapa tahapan penelitian, yaitu pemilihan topik, heuristik atau pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap heuristik, sumber yang diperoleh antara lain sumber primer seperti, surat kabar dan majalah pada masa pendudukan Jepang, serta sumber sekunder seperti buku dan artikel. Sumber primer yang digunakan antara lain surat kabar *Tjahaja* dan *Asia Raya*, serta majalah *Djawa Baroe* yang terbit di tahun 1942 hingga 1945 yang tersedia dalam bentuk mikrofilm. Sedangkan untuk sumber sekunder, menggunakan beberapa buku seperti “Bogor Zaman Jepang” oleh Prof. Susanto Zuhdi, “Kuasa Jepang di Jawa: Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945” oleh Aiko Kurasawa, dan lain sebagainya. Sumber-sumber tersebut berkaitan atau relevan dengan bagaimana situasi dan keadaan masyarakat pada masa pendudukan Jepang, khususnya di wilayah Bogor.

Semua sumber yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan kritik atau verifikasi, baik kritik *ekstern* maupun *intern*. Tahap kritik sumber yang

dilakukan meliputi segi akurasi, kesesuaian, keterbaruan, kebenaran, dan keaslian sumber yang diperoleh. Untuk sumber primer, kritik ekstern dilakukan dengan melihat tahun dan bahasa yang digunakan dalam surat kabar apakah relevan dengan masa pendudukan Jepang untuk memastikan autentisitas sumber. Sedangkan untuk kritik intern, dilihat kesesuaian antara isi sumber dengan keadaan yang sebenarnya untuk menguji kredibilitas dan realibilitas sumber.

Setelah dilakukan kritik atau verifikasi sumber, langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi di mana sumber-sumber yang telah dikritik selanjutnya akan dianalisis dan dijabarkan secara komprehensif menjadi fakta sejarah. Fakta yang telah diinterpretasi tersebut menjadi bahan yang digunakan untuk tahap penulisan yang tersusun secara sistematis, isi yang logis dan dapat dipahami, serta jelas tujuan dan kesesuaiannya dengan topik penelitian. Tahap interpretasi terbagi menjadi dua, yaitu analisis dan sintesis. Proses analisis adalah menguraikan data-data sejarah menjadi suatu pernyataan. Sedangkan proses sintesis adalah menyatukan berbagai data dan sumber sejarah menjadi suatu fakta yang utuh (Kuntowijoyo, 1995).

Hasil dari penelitian ini dijabarkan dengan menggunakan metode deskriptif naratif dalam bentuk historiografi.